

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILU OLEH SENTRA GAKKUMDU DI KOTA BANDAR LAMPUNG

**Oleh :
ANNISA TYAS EFFENDI**

Gakkumdu sebagai sentra penegakan hukum terpadu memiliki peran penting dalam penanganan pidana pemilu. Permasalahan penelitian adalah bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana pemilu oleh Sentra Gakkumdu di Kota Bandar Lampung dan apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana pemilu oleh Sentra Gakkumdu di Kota Bandar Lampung.

Pendekatan masalah dilakukan secara yuridis empiris yaitu dengan melakukan penelitian langsung di lokasi penelitian dengan melihat, bertanya dan mendengar dari pihak-pihak yang terkait. Sumber data yang di dapat dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Narasumber penelitian adalah Bawaslu Kota Bandar Lampung, Polda Lampung, Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan Dosen Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian menunjukkan Sentra Gakkumdu sebagai Sentra Penegakan Hukum Terpadu memiliki peran penting dalam penanganan tindak pidana pemilu, dibentuknya Gakkumdu bermaksud untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu oleh Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Sentra Gakkumdu menerima laporan atau aduan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran pemilu. Setelah menerima laporan, Sentra Gakkumdu melakukan proses verifikasi dan analisis awal untuk menentukan apakah laporan tersebut mengandung unsur tindak pidana pemilu atau hanya pelanggaran administratif. Faktor yang mempengaruhi Sentra Gakkumdu dalam tindak pidana pemilu, Sentra Gakkumdu punya kewenangan untuk mengumpulkan dan mendalami bukti-bukti yang dibutuhkan maupun keterangan saksi sebelum laporan/temuan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu diteruskan kepada pihak kepolisian oleh lembaga Pengawas Pemilu. Faktor penghambat yang paling menonjol pada Sentra Gakkumdu dalam tindak pidana pemilu dari aparat penegak hukum sendiri yaitu. Pertama, terbatasnya kemampuan personel, terutama dari unsur Bawaslu, menunjukkan perlunya pelatihan dan peningkatan pemahaman tentang prosedur penanganan dan undang-undang yang

Annisa Tyas Effendi

berlaku. Kedua, jumlah personel yang terbatas membuat Sentra Gakkumdu kewalahan dalam memproses berbagai laporan tindak pidana, sehingga penambahan sumber daya menjadi sangat penting. Ketiga, dalam pengumpulan alat bukti, kurangnya upaya Bawaslu untuk memanggil saksi-saksi berpotensi mengakibatkan kajian yang tidak lengkap, yang dapat menghambat proses hukum. Terakhir, jangka waktu yang terbatas dalam penanganan laporan tindak pidana menambah kesulitan bagi pihak Gakkumdu untuk menyelesaikan kasus dengan baik.

Saran yang diusulkan dalam penelitian ini adalah ketika bicara dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu maka harapan itu ada di tangan Sentra Gakkumdu, terutama pada bagian Bawaslu yang melakukan proses penyelesaian tindak pidana pemilu pada tahap awal serta diberikan pemahaman terhadap undang-undang dan proses beracara sesuai dengan undang-undang yang berlaku, perlunya penambahan personil Sentra Gakkumdu agar tidak kesulitan serta kewalahan dalam menghadapi laporan/temuan yang masuk secara banyak dan bersamaan, sehingga terciptanya penegakan hukum. Untuk Sentra Gakkumdu, diharapkan agar dapat meningkatkan koordinasi dan kesepahaman antarlembaga dikarenakan sudah diwadahi dalam satu atap dan satu pintu yaitu Sentra Gakkumdu agar terlaksananya proses penyelesaian tindak pidana pemilu yang lebih baik.

Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana, Sentra Gakkumdu, Tindak Pidana Pemilu

ABSTRACT

ELECTION CRIMINAL ACT LAW ENFORCEMENT BY SENTRA GAKKUMDU IN BANDAR LAMPUNG CITY

**By :
ANNISA TYAS EFFENDI**

Gakkumdu as an integrated law enforcement center has an important role in handling election crimes. The research problem is how is the law enforcement of election crimes by the Gakkumdu Center in Bandar Lampung City and what are the factors that affect the enforcement of election crimes by the Gakkumdu Center in Bandar Lampung City.

The approach to the problem is carried out in an empirically juridical manner, namely by conducting direct research at the research site by seeing, asking and hearing from related parties. Data sources obtained by using primary data and secondary data. Data collection procedures are carried out by literature studies and field research. Data analysis in this study uses qualitative analysis. The research sources are Bawaslu Bandar Lampung City, Lampung Regional Police, Lecturer of Criminal Law Department, Faculty of Law, Lampung University, and Lecturer of Constitutional Law Department, Faculty of Law, Lampung University.

The research results show that the Gakkumdu Center as an Integrated Law Enforcement Center has an important role in handling election crimes, the establishment of the Gakkumdu intends to equalize the understanding and pattern of handling election crimes by Bawaslu, the National Police of the Republic of Indonesia, and the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia. Sentra Gakkumdu receives reports or complaints from the public regarding alleged election violations. After receiving the report, the Gakkumdu Center conducts a preliminary verification and analysis process to determine whether the report contains elements of an election crime or just an administrative violation. Factors that affect the Gakkumdu Center in election crimes, the Gakkumdu Center has the authority to collect and investigate the evidence needed and witness statements before the report/finding of the alleged violation of the election criminal act is forwarded to the police by the Election Supervisory Agency. The most prominent hindering factor in the Gakkumdu Center in election crimes from law enforcement officers themselves are. First, the limited capabilities of personnel, especially from the Bawaslu element, show the need for training and improved understanding of handling procedures and applicable laws. Second, the limited number of personnel

Annisa Tyas Effendi

makes the Gakkumdu Center overwhelmed in processing various criminal reports, so that the addition of resources is very important. Third, in the collection of evidence, Bawaslu's lack of efforts to call witnesses has the potential to result in an incomplete study, which can hinder the legal process. Lastly, the limited period of time in handling criminal reports adds to the difficulties for Gakkumdu to resolve the case properly.

The suggestion proposed in this research is that when talking about the alleged violation of election crimes, the hope is in the hands of the Gakkumdu Center, especially in the Bawaslu section who carried out the process of resolving election crimes at the early stages and was given an understanding of the law and the proceedings in accordance with the applicable law, the need for the addition of personnel of the Gakkumdu Center so that it is not difficult and overwhelmed in dealing with many reports/findings and simultaneously, so that law enforcement is created. For Sentra Gakkumdu, it is hoped that it can improve coordination and understanding between institutions because it has been housed in one roof and one door, namely Sentra Gakkumdu so that the process of resolving election crimes is better implemented.

Keywords: Criminal Law Enforcement, Gakkumdu Center, Election Criminal Act